

BAB II

EKSISTENSI GEREJA ORTODOKS UKRAINA – PATRIARKAT MOSKOW DI UKRAINA

Melihat fenomena invasi penuh Rusia ke Ukraina yang melibatkan Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow (UOC-MP) di Ukraina, penting untuk mengetahui bagaimana seluk beluk dan perkembangan Gereja ini untuk kemudian dapat menjadi landasan untuk memahami konflik yang berlangsung secara komprehensif dan detail. Oleh karena itu, bab ini akan menjelaskan beberapa hal mengenai UOC-MP itu sendiri dan perkembangannya. Pada bagian awal akan dijelaskan apa itu UOC-MP dan perkembangannya secara historis dari awal Ortodoksi di Ukraina hingga terbentuknya UOC-MP di Ukraina. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai perkembangan UOC-MP terutama dalam fenomena dan peristiwa yang pernah terjadi di Ukraina seperti Euromaidan, Aneksasi Krimea, dan lain-lain, sampai kepada invasi Rusia ke Ukraina. Lebih lanjut juga akan dijelaskan mengenai bagaimana aktivitas dan pengaruh UOC-MP di Ukraina sepanjang institusi ini berdiri dan kemudian bagaimana invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina memengaruhi eksistensi UOC-MP di Ukraina. Lewat adanya pembahasan berikut nantinya akan dapat menjadi dasar untuk melihat dan menganalisis fenomena yang akan disajikan di bab selanjutnya.

2.1. Pendirian Gereja Ortodoks Ukraina - Patriarkat Moskow di Ukraina

Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow (Ukrainian Orthodox Church – Moscow Patriarchate) atau UOC-MP merupakan sebuah Gereja Ortodoks Timur di Ukraina. Gereja ini secara resmi berdiri di Ukraina pada tahun 1990 berdasarkan Eksarkat Ukraina dari Patriarkat Moskow yang sudah berdiri sebelumnya. Gereja ini juga merupakan bagian dari Patriarkat Moskow yang berarti Gereja ini merupakan bagian dari Gereja Ortodoks Rusia (ROC) yang berpusat di Moskow. UOC-MP dipimpin oleh Metropolitan Onuphrius dari Kyiv, dan sebagai salah satu Gereja Ortodoks terdahulu di Ukraina, UOC-MP memiliki sumber daya manusia dan material yang paling signifikan, komunitas yang luas, dan koneksi

politik yang kuat dari waktu ke waktu sehingga UOC-MP memiliki pengaruh yang cukup mengakar dalam masyarakat Ukraina (Ishchuk & Sagan, 2020). Sebagai bagian dari Patriarkat Moskow, UOC-MP berada dalam status otonomi sehingga UOC-MP bukan sebagai Gereja yang berdiri sendiri dari ROC. Status ini membuat adanya urusan-urusan tertentu dari UOC-MP terlebih dalam hal eksternal seperti memilih Primat, yang memerlukan persetujuan ROC untuk memutuskannya (Richters, 2013). UOC-MP sebagai sebuah institusi Gereja yang berada dalam struktur ROC telah menjadi bagian dari lembaga negara sejak abad ke-17.

Sebagai latar belakang, pengaruh Ortodoksi banyak terlibat dalam sejarah Ukraina. Ortodoksi merupakan warisan dari Kievan Rus yang ditandai dengan pembaptisan Rus oleh Pangeran Volodymyr pada tahun 988. Pembaptisan Kievan Rus ini juga sekaligus menandai berdirinya struktur Ortodoksi Timur yang dikenal sampai saat ini. Setelah pembaptisan Kievan Rus, Kyiv diangkat menjadi Metropolia dalam gereja yang independen dan tergabung dalam Patriarkat Konstantinopel (Clark & Vovk, 2020). Akan tetapi sejak keruntuhan Rus, Metropolia Kyiv terpisah dengan Patriark Ekumenis. Pasca keruntuhan Rus terdapat kedua kerajaan yang merebutkan suksesi Kievan Rus dan Metropolis Kyiv yaitu kerajaan Galicia-Volhynia yang diambil alih oleh Kadipaten Agung Lithuania dan Kadipaten Agung Polandia dan juga kerajaan Vladimir-Suzdal diambil alih oleh Kadipaten Agung Moskow. Metropolis Kyiv akhirnya bertempat di Halych, Novgorodok, dan Vilno sementara Primat yang lain berada di Vladimir-on-Klyazma yang kemudian berakhir di Moskow.

Sebagai sebuah kerajaan, Moskow kemudian berkembang secara militer dan politik yang kemudian memilih untuk mendirikan Gereja otosefalusnya sendiri. Sebagai bagian dari Patriarkat Konstantinopel saat itu dalam partisipasinya dalam Konsili Basel-Ferrara-Florence, mereka memilih Isidore sebagai Uskup Metropolit Kyiv, yang tidak diterima Rusia karena pangeran Rusia lebih menginginkan Uskup Ryazan Jonas sehingga hal ini menjadi deklarasi secara *de facto* bagi Rusia. Otoritas sipil Moskow berupaya memerdekakan sebagian Gereja Kyiv yang berpusat di Moskow dan berusaha membenarkan kejadian ini dengan menuduh Konstantinopel murtad dari Ortodoksi yang dipertegas lagi ketika Kekaisaran Bizantium jatuh ke

tangan Ottoman yang banyak mengalihfungsikan Gereja. Meski awalnya tidak mengakui otonomi dari Gereja Rusia modern, tetapi pada akhirnya Patriark Jeremia II dari Konstantinopel mengakui otonomi ini sehingga Gereja Moskow dapat berdiri (Clark & Vovk, 2020). Lebih jauh lagi, setelah pengakuan otonomi Patriark Dionisius IV Mouselimes sebagai Patriarkat Ekumenis saat itu mengeluarkan dua surat yang memberikan hak bagi Moskow untuk melantik dan menempatkan Metropolitan Kyiv kepadanya dengan ketentuan bahwa Kyiv tetap setia kepada Patriark Ekumenis. Namun hal ini dipersepsikan berbeda oleh Moskow yang menganggap hal ini sebagai penyerapan Metropolia Kyiv secara menyeluruh kepada Rusia (Clark & Vovk, 2020).

Suksesi Metropolia Kyiv dari Konstantinopel ini mengakibatkan putusnya persekutuan Metropolia Kyiv dengan Patriarkat Ekumenis, dan Metropolia Kyiv juga dibersihkan dari etnis Ukraina. Uskup-uskup Ukraina hanya menempati jumlah minoritas dari total Uskup Eparkis dan Vikaris yang ada dan penggunaan Bahasa Ukraina dalam mencetak literatur spiritual atau untuk liturgi dilarang (Clark & Vovk, 2020). Di samping itu periode suksesi ini bertepatan dengan Perjanjian Pereyaslav tahun 1654 yang membuat tepi kiri sungai Ukraina berada dalam kekuasaan kerajaan Muscovite (Moskow) (Richters, 2013). Selain menjadi awal penyerapan Hetamante Ukraina kepada Muscovite, ada juga nuansa spiritual dari perjanjian ini karena beberapa sejarawan menilai jika perjanjian Pereyaslav adalah langkah awal dari pengumpulan tanah-tanah yang akan menjadi “Rusia Raya”. ROC sebagai Gereja Moskow dalam konteks ini juga mengikuti negara tersebut yang mengambil alih yurisdiksi Metropolia Kyiv yang saat itu berada di bawah Konstantinopel dan melakukan Rusifikasi terhadapnya (Richters, 2013). Dengan demikian suksesi ini dapat dinyatakan sebagai akar ketergantungan Ukraina kepada Rusia terlebih secara politik maupun keagamaan. Hal ini berlanjut hingga era Soviet di mana otoritas Soviet menggunakan istilah “nomenklatura” yang mewajibkan penunjukan pejabat Gereja oleh partai, menentang upaya Ukraina untuk membentuk Gereja independen dan memindahkan hierarki Gereja Katolik Yunani-Ukraina yang saat itu memiliki jumlah yang banyak di Ukraina Barat kepada ROC secara menyeluruh pada tahun 1946 (Wawrzonek, 2014).

Akan tetapi, dalam situasi yang tidak stabil menjelang keruntuhan Uni Soviet, UOC-MP hadir sebagai Gereja Ortodoks Ukraina yang terhubung dengan Patriarkat Moskow. Pada saat itu di Ukraina tengah muncul gerakan Ukrainisasi yang diwujudkan dengan gerakan untuk melahirkan kembali Gereja Otosefalus pada tahun 1989. Meski demikian, sebagian besar dari eksarkat patriarkal menolak aspirasi kelompok otosefalus karena menurut mereka ilegal secara kanonis. Melihat fenomena Ukrainisasi di Ukraina dalam lingkungan Ortodoksi, Eksarkat patriarkal Ukraina yang merupakan bagian dari Patriarkat Moskow kemudian menyediakan ruang untuk melakukan Ukrainisasi sederhana yang ditandai dengan perubahan status kanonik dan pemberian hak-hak otonomi yang lebih luas terhadap eksarkat Ukraina. Perubahan status kanonik ini kemudian mengubah Ukraina secara administratif baik dari segi penamaan judul kepala Gereja dan yang paling penting mengubah status gereja di Ukraina dari eksarkat menjadi Gereja Ortodoks Ukraina, atau dalam nama tidak resmi menjadi Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow. Status kanonik yang baru ini juga memberi mereka keistimewaan seperti mengadakan sinode sendiri dan termasuk konsili lokal, memilih dan menahbiskan Uskup, mengkanonisasi orang kudus, dan merevisi ritus liturgi, namun dengan pengecualian bahwa Patriark Moskow berhak untuk mengukuhkan para Uskup yang dipilih oleh sinode (Denysenko, 2018).

Sejak saat itu, UOC-MP berdiri sebagai Gereja Ortodoks bersama dengan organisasi keagamaan lainnya yaitu *Ukrainian Autocephalus Orthodox Church* (UAOC), *Ukrainian Orthodox Church-Kyiv Patriarchate* (UOC-KP), dan *Ukrainian Greek Catholic Church* (UGCC). Akan tetapi hubungan antar organisasi keagamaan ini pada tahun 1991 relatif tegang. UOC-MP sebagai bagian dari Patriarkat Moskow cenderung mengikuti sikap “Gereja Induk” nya yang menolak UAOC dan UOC-KP yang dipandang sebagai skismatis dan merupakan lembaga yang tidak sah. UOC-MP juga mengecam UGCC karena hal proselitisme atau perpindahan agama secara aktif dari penganut Ortodoks kepada iman Katolik (Richters, 2013). Sebagai Gereja Ortodoks awal dan salah satu yang terkemuka di Ukraina, populasi umat UOC-MP mayoritas berada di wilayah Ukraina Timur dan Selatan sementara yang lain seperti UAOC dan UGCC di Ukraina Barat, dan UOC-

KP di bagian Barat dan Tengah. Meski demikian, UOC-MP tetap menjadi salah satu pusat perkembangan komunitas Ortodoks di Ukraina yang secara khusus memiliki basis penduduk dan jumlah paroki yang religius di bagian Ukraina Barat. UOC-MP tercatat memiliki jumlah umat pada tahun 2011 sebanyak kira-kira 12.043 umat seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1, tetapi hanya sekitar 12% umat Ortodoks yang mengakui jika mereka terafiliasi dengan UOC-MP seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.1 Jumlah paroki Ortodoks di Ukraina pada tahun 1997 hingga 2011

	1997	2002	2007	2011
UOC – Moscow Patriarchate	7,018	9,515	11,085	12,043
UOC – Kiev Patriarchate	1,591	3,050	3,882	4,401
UAOC	1,184	1,055	1,155	1,193
UGCC	3,176	3,336	3,480	3,647

Sumber: *The Religious Information Service of Ukraine* dalam Richters, 2013

Tabel 2.2 Distribusi Umat Beriman di Ukraina tahun 2000

UOC – Kiev Patriarchate	22%
UOC – Moscow Patriarchate	12%
Orthodox, but do not belong to any denomination	26%
Ukrainian Greek Catholic Church	8%
Ukrainian Autocephalous Orthodox Church	1%
Roman Catholic Church	1%
Other	5%
Do not belong to any denomination/ecumenist	25%

Sumber: *The Religious Information Service of Ukraine* dalam Richters, 2013

2.2. Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow Gereja Ortodoks Ukraina Patriarkat Moskow Pasca Kemerdekaan Ukraina

2.2.1 UOC-MP pada saat periode Euromaidan

Sebagai salah satu Gereja Ortodoks terkemuka di Ukraina saat itu, UOC-MP memiliki legitimasi, pengaruh politik, dan kelebihan lainnya yang menonjol dibandingkan Gereja-Gereja Ortodoks serupa di Ukraina. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, UOC-MP perlahan mendapatkan prasangka yang buruk dari publik Ukraina yang kemudian memengaruhi posisi dan statusnya. Keadaan ini terlebih menguat pada peristiwa Euromaidan yang dipercaya menjadi titik balik bagi warga Ukraina untuk secara kolektif berjuang melawan dominasi Moskow di negaranya, dan memaksa mereka untuk mempertegas siapa yang harus mereka dukung. Oleh karena itu UOC-MP mendapat tekanan besar termasuk seruan untuk bersatu dengan Gereja Ortodoks Ukraina Otosefalus sebagai perwujudan kemerdekaan nasional yang bermartabat. Saat pecahnya protes, UOC-MP yang memiliki kerja sama dengan Presiden Yanukovych pada periode tahun 2010-2014 mempertegas posisi mereka yang kian dilematis (Hudson, 2018).

Euromaidan merupakan peristiwa demonstrasi atas kebijakan Viktor Yanukovych yang memenangkan pemilu tahun 2010. Demonstran pada saat itu mengkritik penandatanganan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa yang ditangguhkan Yanukovych. Yanukovych enggan untuk berkompromi dan takut untuk meninggalkan jabatannya berujung pada kekerasan dan runtuhnya struktur negara sehingga membuka jalan bagi intervensi Rusia di Krimea dan Ukraina timur. Banyak dari masyarakat Ukraina bersikeras jika hal ini adalah bentuk dari perjuangan mereka melawan Rusia dan bentuk dari usaha untuk menentukan nasib sendiri. Banyak ahli juga menilai jika Euromaidan adalah ekspresi dari perjuangan yang sedang berlangsung atas hegemoni ideologis antara Barat dan Rusia (Shinar, 2022).

Tidak seperti UOC-KP dan UGCC yang secara kolektif dan tegas dalam mengekspresikan solidaritas mereka terhadap masyarakat Ukraina dan secara terbuka mengkritik Yanukovych, UOC-MP terkesan terbagi-bagi dalam

menunjukkan pandangan dan posisinya. Secara umum UOC-MP terlihat lebih bersikap netral, dan terkesan ingin mengambil jalan yang aman dan menunjukkan pernyataan yang lebih cenderung menekankan nilai-nilai Kristiani. Hal ini ditunjukkan dengan pesan Metropolitan Volodymyr sebagai Patriark saat itu yang mendukung Euromaidan. Meski demikian, UOC-MP dicap resisten dan tidak partisipatif dalam gerakan tersebut (Hudson, 2018). Walau memilih untuk netral, UOC-MP tidak mengingkari fenomena ini sebagai bagian dari fenomena politik dan bagian dari perputaran kekuasaan, menggarisbawahi bahwa keterlibatan organisasi-organisasi keagamaan secara aktif dalam fenomena ini hanya memperkeruh suasana, dan adanya tujuan untuk mengaburkan dimensi “kemarahan moral” atas tindakan kekerasan kepolisian terhadap mahasiswa yang kemudian ditujukan oleh imam Heorhii Kovalenko untuk melegitimasi netralitas UOC-MP (Shestopalets, 2020b).

Sumber lainnya menyebutkan pandangan yang cukup berbeda dari Patriarkat Moskow mengenai kondisi krisis yang sedang terjadi. Metropolitan Hilarion sebagai juru bicara resmi Patriarkat Moskow dalam pertemuan *European Orthodox-Catholic Forum* keempat menyampaikan pidato yang menyinggung dan menyebutkan kata-kata uniate dan skismatik yang tampaknya ditujukan untuk mengecam UGCC (uniat) dan UOC-KP (skismatik) yang memang merupakan kelompok agama paling aktif di Maidan. Metropolitan Hilarion juga terus menekan gereja-gereja Ukraina yang mendukung Maidan dan mengutuk agresi Rusia dengan meminta para kelompok uskup Katolik untuk menghentikan proyek uniatenya yang dianggap menghancurkan kanonisitas Ortodoksi. *Standpoint* yang ditunjukkan Hilarion ini terkesan menafsirkan pandangan yang sangat kritis terhadap kelompok-kelompok agama terlebih Gereja-Gereja Ukraina yang mendukung Maidan terutama ketika bersinggungan dengan potensi Maidan sebagai penghalang bagi perkembangan doktrin Dunia Rusia karena potensi yang lebih besar dalam konsolidasi identitas nasional (Denysenko, 2018).

2.2.2 Periode setelah peristiwa Euromaidan

Pada periode pasca Euromaidan proyeksi geopolitik Rusia di Ukraina semakin intensif yang ditandai dengan adanya dua peristiwa yang cukup menjadi sorotan yaitu aneksasi Krimea dan konflik di wilayah Donbas pada tahun 2014. Bersamaan dengan hal tersebut, keterlibatan UOC-MP dalam perang ideologis ini semakin nyata terjadi. Meski pada awal Februari 2014 mereka menunjukkan simpati dan upaya untuk mendukung integritas Ukraina. Tetapi pernyataan mereka tidak dapat terlepas dari pernyataan-pernyataan politis, terutama ketika mereka menyebut krisis di Ukraina sebagai konflik internal dan perang saudara yang sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan Patriark Kirill selaku pemimpin ROC dan bertentangan pula dengan pandangan Ukraina yang menyebutkan jika perang ini semata-mata terjadi karena adanya pihak asing yaitu Rusia. Di sisi lain, mereka menolak untuk diasosiasikan dalam penyebaran doktrin Dunia Rusia yang bersifat politis, namun di sisi yang lain mereka masih mengakui kesatuan dengan ROC yang kemudian terlihat dari sikapnya yang tidak menyuarakan gerakan separatis dalam peristiwa ini karena hal tersebut hanya akan menghancurkan ideologi budayanya sendiri. Meski demikian, mereka kemudian mempertahankan posisinya dengan Rusia dan begitu juga mendukung integritas kedaulatan Ukraina untuk menangkis persepsi dan publikasi negatif dengan mengadakan aktivitas sosial, terlibat di militer, dan menyediakan layanan pemakaman kepada tentara Ukraina yang jatuh (Shestopalets, 2019).

Sikap dan pendirian UOC-MP yang terkesan ambigu dan cenderung kontradiktif dengan pemerintah Ukraina memberikan efek buruk bagi reputasi UOC-MP. Di dalam studi yang dilakukan pada bulan April 2014, dilaporkan oleh pers Ukraina bahwa 32% dari responden menganggap diri mereka terafiliasi dengan UOC-KP sementara 25% dari mereka menyatakan diri sebagai anggota UOC-MP. Selain dapat disimpulkan sebagai adanya jumlah responden yang secara persentase mulai meninggalkan UOC-MP, muncul juga kesimpulan lainnya yakni makin besarnya tingkat polarisasi politik yang memengaruhi pandangan agama yang ditunjukkan dengan jumlah orang yang mengaku “Ortodoksi saja” tanpa mengakukan denominasinya turun dari 28,8 % menjadi 21, 2% pada tahun 2016

(Hudson, 2018). Reputasi mereka juga turut hancur ketika banyak umat beriman dari denominasi UOC-MP sendiri memutuskan untuk memilih organisasi keagamaan alternatif sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap mereka terlebih ketika mereka menyebutkan jika UOC-MP lebih terlihat sebagai instrumen politik alih-alih sebagai Gereja dan menyatakan juga jika terlibat dengan Patriarkat Moskow berarti ikut serta dalam pembunuhan.

Pemerintahan Ukraina merespon kondisi krisis yang sudah terjadi pendekatan legislatif. Verkhovna Rada sebagai parlemen Ukraina berupaya mengembangkan undang-undang Addendum No. 2662-VIII pada hukum Ukraina “Tentang Kebebasan Hati Nurani dan Organisasi Keagamaan” pada tahun 2018. Undang-undang ini menyampaikan jika organisasi keagamaan yang “pusat administrasi” formalnya berlokasi di luar negeri yang diakui oleh parlemen sebagai negara agresor, diwajibkan oleh hukum untuk mencantumkan nama pusat administrasinya dalam nama resminya. Oleh karena itu, UOC-MP perlu memberi label Patriarkat Moskow, dan labelisasi ini untuk menunjukkan jika Parlemen menetapkan ini juga akhirnya untuk menetapkan status UOC-MP sebagai ancaman keamanan nasional Ukraina sehingga terdapat alasan untuk melegitimasi segala tindakan selanjutnya. Implikasi lainnya dengan melabeli UOC-MP sebagai bagian dari Patriarkat Moskow, maka Parlemen dapat memotivasi umat beriman untuk berpindah dari UOC-MP kepada organisasi keagamaan yang memang secara terafiliasi dengan Ukraina, terutama dengan OCU (Shestopalets, 2020a).

Pergantian presiden kepada era Presiden Poroshenko juga membawa UOC-MP makin tersudut. Pada era Presiden Poroshenko, Ukraina terutama lewat pemerintahannya berupaya untuk mendorong pemberian *Otokefali* kepada Patriarkat Konstantinopel dan didukung oleh Parlemen Ukraina. Pada mulanya, Poroshenko menyatakan jika urgensi geopolitik menjadi alasan dibutuhkannya *Otokefali* sehingga urgensi pemberian *otokefali* menjadi tanggungjawab pemerintah dibanding Gereja (Shestopalets, 2020a). *Otokefali* baru dapat direalisasikan pada tahun 2018, yang ditandai dengan dikabulkannya permohonan Presiden Petro Poroshenko untuk diberikannya *tomos* kepada Gereja OCU. Konsili para Imam UOC-KP, UOAC dan sebagian pendeta UOC-MP, berhasil merumuskan

Gereja Ortodoks Ukraina yang kemudian disusul dengan pemberian *tomos* dan *otokefali* oleh Patriark Ekumenis Bartholomew I kepada kepala OCU yang baru terpilih Metropolitan Epifani dan juga Presiden Poroshenko. Oleh karena itu, dikotomi Ortodoksi di Ukraina saat itu berubah menjadi OCU dan UOC-MP.

Melalui Sinode Suci di Istanbul pada 9-11 Oktober 2018, ditetapkan bahwa umat beriman dari gereja-gereja non-kanonik telah dipulihkan dalam kesatuan dengan Gereja. Akan tetapi, UAOC dan UOC-KP tidak akan diakui statusnya sebagai Gereja kanonik sehingga diharuskan untuk mendirikan Gereja baru yang statusnya diakui oleh Konstantinopel, sehingga Gereja yang akan menerima *otokefali* akan berada di bawah Konstantinopel. Pada akhirnya, Gereja baru didirikan oleh Dewan yang diadakan di Santa Sophia dari Kyiv pada 15 Desember 2018, dan UAOC serta UOC-KP kemudian secara struktural bergabung dengan OCU. Proses *otokefali* ini berjalan beriringan dengan konsolidasi dan pelebagaan masyarakat sipil di Ukraina dengan menekankan proses yang lebih damai dan sukarela, sehingga aliansi yang dibangun bersama ini menjadi pondasi masyarakat Ukraina yang ideal dan dasar dari pembangunan pemerintahan yang baik (Vovk, 2020).

Hal ini secara tidak langsung memengaruhi eksklusivitas kanonik dari UOC-MP setidaknya dalam tiga hal yaitu mengenai cara untuk mendapatkan *otokefali* adalah diusulkan secara kanonik, mitos skismatis dan bidah yang dianggap sebagai pengikut UOC-KP dan UOAC dimusnahkan dan disarankan kepada mereka untuk bersatu dengan Gereja Ortodoks lokal, serta UOC-MP yang kehilangan statusnya sebagai “Induk Gereja” terhadap Gereja-Gereja Ortodoks terdahulu di Ukraina, sehingga pemimpinnya tidak akan dipanggil sebagai Metropolitan Kyiv dan Seluruh Ukraina (Tokman, 2023).

2.2.3. UOC-MP pada saat Invasi Skala Penuh Rusia

Pada bulan Februari tahun 2022, Rusia memulai invasi skala penuh terhadap Ukraina. Menanggapi hal ini, banyak pihak terutama negara mengkritisi langkah yang diambil pemerintah Rusia tersebut, tidak terkecuali para uskup yang terkait dengan Gereja Ortodoks yang memiliki hubungan dengan Moskow. UOC-MP

menyesalkan penderitaan yang terjadi akibat keadaan itu sembari menyerukan perdamaian atasnya. Metropolitan Onufriy dari Kiev sebagai pemimpin UOC-MP saat itu menyebut kejadian ini sebagai bencana. Di sisi lain, Patriark Kiril sebagai pemimpin Gereja Ortodoks Rusia menyampaikan rasa prihatinnya dan menyerukan untuk mengambil langkah yang mungkin untuk menghindari bertambahnya jumlah korban sipil dalam peristiwa ini (Giangravé & Jenkins, 2022). Meski demikian, Kiril tetap mengambil posisi yang mendukung dan memberkati tindakan Rusia ini.

Secara resmi, UOC-MP menyampaikan segala pandangannya mengenai konflik yang terjadi lewat Sinode Suci Gereja Ortodoks Ukraina pada 12 Mei 2024. Dalam Sinode yang dipimpin oleh Metropolitan Onufriy, UOC-MP menyerukan bagi Pemerintahan Federasi Rusia, Presiden Vladimir Putin, dan Patriark Kiril untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menghentikan kondisi ini (Ukraine Orthodox Church, 2022a). Pada Sinode yang sama, mereka juga menyebutkan jika tindakan Presiden Poroshenko di masa lalu menjadi penyebab dari terjadinya invasi ini. Mereka juga berharap jika Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengintervensi tindakan-tindakan untuk menghentikan permusuhan agama di masyarakat Ukraina, termasuk UOC (Ukraine Orthodox Church, 2022a).

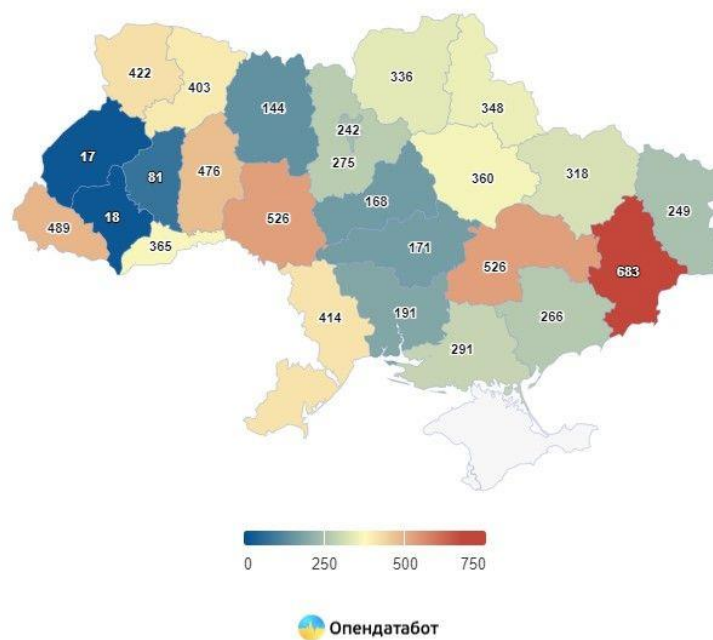
Tidak berselang lama, pada 27 Mei 2024 UOC menyampaikan Resolusi Dewan Gereja Ortodoks Ukraina yang memuat poin-poin mengenai sikap UOC-MP. Beberapa poin sudah disampaikan lewat Sidang Sinode sebelumnya seperti mengutuk terjadinya perang dan mendorong pihak-pihak berwenang dari Federasi Rusia dan Ukraina untuk bernegosiasi dan mencari kata-kata yang kuat untuk menghentikan pertumpahan darah. Akan tetapi, beberapa resolusi menunjukkan pandangan yang cukup berbeda dari sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah ketidaksetujuan dengan posisi Patriark Kirill mengenai perang, pengadopsian penambahan dan perubahan yang relevan pada Statuta Administrasi Gereja Ortodoks Ukraina yang menunjukkan otonomi penuh dan independensi Gereja Ortodoks Ukraina, ungkapan penyesalan mengenai berpisahnya UOC-MP dan OCU yang mendorong agar dibukanya dialog bersama OCU dengan beberapa ketentuan yakni meminta penghentian penyitaan Gereja dan pemindahan paksa paroki-paroki UOC, meminta mereka menyadari status kanonik mereka yang tidak

lebih dari kebebasan dan kesempatan dalam pelaksanaan Gereja, serta menyelesaikan masalah kanonikalitas hierarki OCU (Ukraine Orthodox Church, 2022b). Poin yang cukup menarik dari klausul resolusi ini adalah mengenai pengadopsian penambahan dan perubahan yang relevan pada Statuta Administrasi Gereja Ortodoks Ukraina. Hal ini menunjukkan otonomi penuh dan independensi Gereja Ortodoks Ukraina. UOC-MP mencoba menghilangkan segala referensi dengan Moskow dalam statutenya, terutama menghapus paragraf yang menyebutkan bahwa UOC-MP adalah bagian yang memerintah sendiri dari ROC (Ukraine Orthodox Church, 2022b). Dengan demikian, dalam statutenya UOC-MP tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan ROC, meski ROC masih memiliki aturan yang mengatur UOC-MP.

UOC-MP juga menemui halangan lainnya dalam menjalankan aktivitasnya. Pertama dari pendekatan legal pemerintah Ukraina yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 3894 ‘Tentang Perlindungan Tatanan Konstitusional di Bidang Organisasi Keagamaan’ yang melarang aktivitas Gereja Ortodoks Rusia di Ukraina dan juga mengatur hal-hal lain terutama pengaturan aktivitas organisasi yang berafiliasi dengan negara agresor (Embassy of Ukraine in Indonesia, 2025). Parlemen telah mengadopsi secara keseluruhan rancangan undang-undang tersebut dalam pembacaan kedua dengan 256 suara yang mendukung. Yaroslav Zhelezniak menyebutkan jika undang-undang tersebut akan berlaku 30 hari setelah diterbitkan, kecuali dalam klausul yang menyebutkan komunitas UOC-MP akan diberi waktu 9 bulan untuk memutuskan hubungan mereka dengan UOC (Erugur, 2024). Selain secara hukum, pemerintah Ukraina juga memindahkan status administratif Kiev-Pechersk dari UOC-MP ke negara, penangkapan pendeta-pendeta yang dianggap melakukan kegiatan subversif dengan sebanyak 68 proses pidana terhadap perwakilan UOC-MP dan 14 di antaranya adalah Metropolitan Gereja, dan juga penggeledahan dan penangkapan terhadap pendeta-pendeta UOC-MP (SSU, 2023).

Di sisi lain fenomena perpindahan komunitas UOC-MP ke OCU juga makin meningkat. Setidaknya menurut data dari Layanan Negara Ukraina untuk Kebijakan Etnis dan Kebebasan Hati Nurani pada tahun 2023, sebanyak 472 komunitas agama beralih afiliasi dari UOC-MP ke OCU sehingga selama tahun

2022-2023, terdapat total 968 komunitas yang bergabung dengan OCU (Religious Information Service of Ukraine, 2024c). Sedangkan pada tahun 2024, menurut lembaga yang sama disebutkan jika jumlah total komunitas yang mengubah subordinasinya menjadi UOC sebanyak 232 orang sehingga total keseluruhan paroki yang bergabung dengan OCU adalah sebanyak 1.200 paroki (Religious Information Service of Ukraine, 2024a). Jumlah ini juga cukup terlihat di beberapa lokasi seperti di Lviv yang tidak memiliki komunitas keagamaan yang terafiliasi dengan UOC-MP serta di Volyn Oblast, Rivne Oblast, dan Zhytomyr yang melarang kegiatan UOC-MP di wilayah tersebut (Balachuk, 2023; Romanenko, 2023).



Gambar 2.1 Persebaran UOC-MP di Ukraina

Sumber: (Opendatabot dalam Religious Information Service of Ukraine, 2024c)

Kondisi dan fenomena semacam ini juga menarik perhatian Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan ke-9481 tanggal 17 November 2023 terdapat narasi yang menyebutkan jika ada kekhawatiran akan tidak terpenuhinya hak kebebasan beragama yang meningkat sejak Februari 2022 di Ukraina yang juga

disandingkan dengan ketegangan yang meningkat antara UOC dan OCU. Sejak Februari 2022, OHCHR mencatat 10 kekerasan fisik dan 6 ancaman kekerasan yang menjadi akibat dari perselisihan antar jemaat Ortodoks di sana (United Nations, 2023). Di sisi lain, terdapat lebih dari 6.600 kasus pidana yang diajukan individu atas kolaborasi dan kejahatan terkait konflik lainnya di Ukraina yang 68 kasusnya melibatkan anggota UOC. Asisten Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia di Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Ilze Brands Kehris menyoroti pembacaan pertama Parlemen Ukraina yang jika diadopsi akan menetapkan prosedur pembubaran bagi organisasi keagamaan yang berafiliasi penuh dengan pusat pengaruh dan pengelolaannya berada di negara agresor (United Nations, 2023).

2.2.4 Hubungan UOC-MP dengan Rusia Pasca Kemerdekaan Ukraina

Menyangkut hubungannya dengan Rusia, UOC-MP menjaga subordinasinya dengan ROC sebagai Gereja induk dari UOC-MP sendiri. Di dalam hal ini UOC-MP terkoneksi dengan pemerintah Rusia secara tidak langsung karena UOC-MP lebih terlihat memiliki hubungan formal yang langsung dengan ROC, sementara ROC sendiri terkoneksi dengan pemerintah Rusia secara langsung. Hubungan antara UOC-MP dan Rusia melalui ROC secara khusus dapat diperhatikan pasca kemerdekaan Ukraina, terlebih melalui rangkaian peristiwa sejarah mulai dari Euromaidan hingga invasi skala penuh Rusia pada tahun 2022 yang lalu. Sepanjang periode pasca kemerdekaan ini, UOC-MP dianggap menjadi sumber potensial bagi berkembangnya *soft power* Rusia terutama dari segi perkembangan budaya Rusia dan narasi ideologis yang berpihak kepada Rusia (Hudson, 2018).

UOC-MP sendiri secara administratif mengadopsi Statuta Administrasi Gereja Ortodoks Ukraina yang diakui Patriarkat Moskow sehingga kemudian mengidentifikasi statusnya dengan jelas sebagai Gereja yang memerintah sendiri di dalam Gereja Ortodoks Rusia dan menjadi bagian dari lembaga negara sejak abad ke-17. Hal ini melegitimasi kesatuan UOC-MP dalam struktur ROC. Di samping itu, sejak awal kekuatan Rusia terbentuk, Patriarkat Moskow dan Rusia bekerja

secara harmonis yang kemudian disebut sebagai “kekuatan sekuler dan gerejawi” (Ishchuk & Sagan, 2020). Patriarkat Moskow juga memiliki keselarasan pandangan mengenai pemahaman neo-imperialisme Rusia yang bertujuan untuk “melindungi kepentingan Rusia dan rekan senegarannya di luar negeri” yang kemudian dimanifestasikan dalam doktrin Dunia Rusia (*Russkiy Mir*) yang turut melibatkan Ukraina dalam orbitnya. Menurut ROC, doktrin ini dapat dipertukarkan dengan prinsip Rus Suci yang merupakan sebuah budaya transnasional kolektif yang terdiri dari orang-orang yang bersatu oleh keyakinan Ortodoks Rusia yang sama, tanpa memandang bahasa ibu atau etnisitas, yang berbagi ‘cara hidup yang telah diwariskan kepada kita selama berabad-berabad oleh para santo besar dari Tanah Rusia’.

Doktrin ini kemudian menjadi motor dari diskursus neo-imperialisme Rusia. Menurut S. Kahamlyk, informasi mengenai Rusia modern telah menyusup ke masyarakat Ukraina lewat doktrin “Dunia Rusia” yang ditafsirkan sebagai bentuk khusus dari persatuan Gereja oleh ideolog neo-imperial Rusia sehingga aktivitas UOC-MP sebagian direduksi yang menjadi propaganda instrumental dan fungsional dari ide-ide anti-negara dan anti-Ukraina. terlebih pada saat peristiwa-peristiwa sejarah pasca kemerdekaan terlebih saat Euromaidan hingga aneksasi Krimea. UOC-MP sebagai struktur yang berafiliasi dengan ROC, telah dibentuk dan menjadi saluran diseminasi narasi justifikasi agresi Rusia di Ukraina. Di samping itu, UOC-MP telah dipandang sebagai sumber pengaruh budaya Rusia dan mempromosikan rasa warisan spiritual bersama dari Rus Suci dan keterikatan dengan Dunia Rusia.

Hal ini kemudian menjadi momentum yang melibatkan UOC-MP dalam serangkaian propaganda Kremlin, secara khusus pada periode pasca kemerdekaan. Secara umum, UOC-MP tetap mempertahankan subordinasinya dengan ROC sepanjang periode tersebut. Di sisi lain, seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, UOC-MP menjadi “alat” bagi ROC untuk menyebarkan narasi neo-imperialisme Rusia di Ukraina. Secara khusus pernyataan ini dapat disorot secara spesifik mulai saat peristiwa Euromaidan hingga invasi skala penuh Rusia ke Ukraina tahun 2022 yang lalu. UOC-MP cenderung menunjukkan penolakan

terhadap gagasan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Pada versi yang lain, UOC-MP cenderung mengambil posisi yang netral ketika Rusia melakukan agresi ke Ukraina dengan menyebutnya sebagai “perang saudara” alih-alih menunjukkan tendensi untuk berpihak ke Ukraina secara tegas. Mereka juga memberkati dan mendukung Rusia dalam perang, pemblokiran jalan ke Luhansk, mencegah pergerakan pasukan dan sarana Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU) ke wilayah operasi anti teroris, narasi dukungan terhadap Rusia, dan juga secara terbuka menolak untuk mendukung inisiatif otokefali terhadap OCU (Harned, 2022; Vovk, 2020). Secara khusus pada saat aneksasi Krimea dan perang di Donbas, Patriarkat Moskow telah menandatangani perjanjian dengan semua kekuatan dari lembaga kementerian Rusia mengenai “pencerahan spiritual dan moral” di mana para pendeta UOC-MP berada pada posisi kunci di pasukan keamanan Rusia. Oleh karena itu, secara praktis semua pendeta UOC-MP yang berada di area pendudukan mendukung narasi anti-Ukraina dan secara aktif bekerja sama dengan otoritas yang melakukan pendudukan (Ishchuk & Sagan, 2020).

Perkembangan terakhir dari hubungan UOC-MP dengan Rusia ditandai pada saat invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 awal. Pada 27 Mei 2022, UOC-MP melalui Dewan UOC-MP mengambil langkah mengenai agresi militer ini. Hasilnya beberapa klausul diadopsi, berikut pembahasan beberapa hal seperti sikap Gereja terhadap perang, masalah perlindungan Patriarkat Moskow, visi organisasinya tentang kemerdekaannya sendiri, dan lain-lain (Ukraine Orthodox Church, 2022b). Salah satu hal yang cukup menarik dalam pertemuan Dewan tersebut adalah UOC-MP menyatakan kemerdekaannya dari hubungannya dengan Rusia dan mengutuk perang. Meski demikian, hal ini bukan merupakan hasil yang serius mengingat, banyak hal dalam klausul pertemuan Dewan tersebut yang sebenarnya cukup kontradiktif satu dengan yang lain, sehingga pernyataan UOC-MP mengenai kemerdekaannya tidak dapat bisa dijamin (Kuryliak & Synchak, 2022). Di samping itu, amandemen statuta ini juga masih kontroversial, karena dari penyelidikan yang dilakukan oleh Layanan Negara untuk Etnopolitik dan Kebebasan Hati Nurani bersama kelompok ahli pada tahun 2022 menyimpulkan hasil jika UOC-MP masih memertahankan subordinasinya dengan Patriarkat Moskow sehingga berdasarkan

penyelidikan ini, klaim UOC-MP mengenai independensi dari ROC seolah tidak dapat diterima, karena menurut hasil penyelidikan tidak ada dokumen dari UOC-MP yang menunjukkan arah untuk menjadi Gereja mandiri dari ROC

2.3 Relasi antara Gereja dan Pemerintah Ukraina

Di dalam memahami hubungan antara Gereja dan Pemerintah Ukraina, pertama-tama dapat dipahami dari perspektif legal. Berdasarkan hukum, Ukraina memisahkan hubungan antara Gereja dan negara seperti yang tertulis dalam Konstitusi Ukraina dan Undang-Undang mengenai Kebebasan Hati Nurani dan Organisasi Keagamaan Nomor 987 tahun 1991 yang secara sederhana berupaya untuk memisahkan kehidupan Gereja dan negara. Undang-undang ini melarang campur tangan negara dalam hubungan agama, urusan dan pemerintah internal, serta pendanaan publik agama. Organisasi keagamaan dikeluarkan dari kehidupan politik. Undang-undang juga menempatkan berbagai organisasi keagamaan dalam taraf yang setara, tidak ada tingkatan hukum berdasarkan seberapa lama mereka berdiri di Ukraina. Tidak ada agama tradisional yang diakui secara resmi di Ukraina. Menurut Vovk, hal ini menunjukkan sifat pemisahan dalam hubungan antara Gereja dan negara (Vovk, 2020). Meski secara formal, hubungan antara Gereja dan negara terpisah, tidak dapat dipungkiri jika agama berperan penting dalam struktur sosial, sehingga selalu menjadi bagian dari struktur negara, politik, dan ideologis.

Meski secara tertulis hubungan antara Gereja dan pemerintah terpisah, sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, beberapa fitur yang menunjukkan model kerja sama dalam hubungan Gereja dan negara semakin terlihat, terlebih dalam hal denominasi di mana dalam perkembangannya Gereja-Gereja di Ukraina semakin berkembang menjadi Gereja-Gereja tersendiri. Sejak awal tahun 1990an hingga saat ini, pendirian OCU pada tahun 2018-2019, terdapat empat Gereja yang mengklaim status sebagai Gereja di mana terdapat tiga Gereja Ortodoks (UOC-MP, OCU (terdiri dari UAOC, dan UOC-KP)) dan satu Gereja Katolik-Yunani (UGCC). Gereja-Gereja ini telah mencoba menjaga hubungan dengan pemerintah dan negara dan salah satu contohnya adalah Filaret kemudian mendapat perlindungan dari

pemimpin Ukraina pasca-Soviet sekaligus presiden pertama Ukraina, Leonid Kravchuk. Kravchuk saat itu cukup berpengaruh dalam dukungan Presiden Kravchuk terhadap Metropolitan Filaret dalam perjuangan otokefalnya di mana pada saat itu Kravchuk mengambil kendali terhadap proses institusionalisasi gagasan otokefali Ukraina (Denysenko, 2018). Contoh lainnya ketika Revolusi Oranye Presiden Yushchenko yang didukung UOC-KP dan UGCC dalam pemilihan presiden kalah dari Yanukovych yang didukung UOC-MP (Vovk, 2020).

Akan tetapi pola hubungan antara Gereja dan negara mengalami penyesuaian pola terlebih sejak tahun 2014. Menurut Vovk (2019) terdapat beberapa perubahan dalam hubungan antar keduanya dalam tiga hal yakni, perubahan terkait militer, perubahan terkait keamanan nasional, dan perubahan tidak langsung. Dari segi militer, perubahan yang terjadi adalah keterlibatan pendeta-pendeta atau pemuka agama dari kelompok-kelompok religius dalam militer. Konflik militer dengan Rusia terutama saat konflik Donbas menjadi sangat intensif, akhirnya ruang bagi keterlibatan agama dalam militer dibuka, namun atas keputusan Menteri Dalam Negeri Ukraina saat itu, UOC-MP tidak diizinkan untuk dipekerjakan sebagai Pegawai Nasional dan Unit Militer Layanan Perbatasan Negara (Vovk, 2019). Dari segi keamanan nasional, pemerintah Ukraina cenderung berupaya untuk menggunakan legitimasi, kepercayaan sosial, otoritas, dan potensi penyatuan dan diplomasi Gereja-Gereja untuk melawan Rusia secara langsung mau pun memfasilitasi integrasi ke Uni Eropa (Vovk, 2019). Jelas logika ini tidak sejalan dengan UOC-MP yang cenderung lebih menunjukkan dukungannya kepada Rusia, sehingga Gereja-Gereja lain seperti UGCC dan UOC-KP lebih dianggap selaras dengan agenda politik Ukraina, terlebih ketika mereka memosisikan diri sebagai Gereja tradisional yang ingin berkontribusi terhadap keamanan nasional, sehingga masuk akal bagi pemerintah untuk melakukan kerja sama. Hal ini juga yang menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk lebih mendukung UOC-KP alih-alih UOC-MP karena dianggap sebagai sumber dan kekuatan pengaruh Rusia di Ukraina, terlebih dengan mendukung inisiatif otokefali yang kemudian memunculkan OCU sebagai Gereja yang lebih dikehendaki. Terakhir, dalam hal perubahan tidak langsung, pada aspek sosial, edukasional, dan lingkup keluarga dan

juga dalam bidang agama publik, pemerintah menekankan hubungan baik dengan agama, memperkuat pemulihan institusional dan simbolis.

Jika menyoroti secara khusus hubungan antara UOC-MP dan negara, hubungan yang terlihat cenderung menunjukkan ketidakpercayaan terhadap institusi ini. UOC-MP lebih menunjukkan keberpihakannya terhadap Rusia atau ROC dengan serangkaian mekanisme seperti mempromosikan Dunia Rusia, tidak mengutuk invasi Rusia dan cenderung menunjukkan dukungan terhadap Rusia. Hal ini yang kemudian menjadi pertentangan besar antara UOC-MP dengan Ukraina. Tidak seperti Gereja-Gereja lain yang secara terbuka mendukung upaya dari pemerintah-pemerintah Rusia, UOC-MP lebih sering menghindari untuk menunjukkan dukungan terhadap Ukraina dengan alih-alih mengambil posisi yang netral, dengan dalih untuk mempertahankan kesatuannya dengan Rusia dan disisi lain tetap mendapatkan kepercayaan publik Ukraina. UOC-MP seolah tidak dikehendaki sebagai institusi agama yang kemudian mendorong beberapa tindakan tegas yang ditujukan terhadapnya seperti pembahasan RUU yang mencoba membatasi aktivitas UOC-MP Undang-Undang No. 2662 tahun 2018 yang mensyaratkan organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan negara agresor untuk menunjukkan dengan jelas afiliasi mereka dengan induk Gereja Rusia yang relevan di dalam namanya. Pada tahun 2019, pada tahun yang sama dengan pembentukan OCU, Undang-Undang No. 2673 diadopsi untuk menyederhanakan prosedur perpindahan komunitas agama dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Proses transfer baru dibuat secara eksklusif oleh sebagian besar anggota, sehingga dalam prosesnya tidak memerlukan lagi persetujuan Uskup yang berkuasa (Vovk, 2019). Di sisi lain, pada saat invasi tahun 2022, serangkaian RUU seperti RUU No. 7213 tahun 2022, RUU No. 8221 tahun 2022, RUU No. 8262 tahun 2022, dan RUU 8371 tahun 2023 yang coba diadopsi untuk memastikan aktivitas organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan negara agresor dapat benar-benar dilarang (Bodak & Baran, 2024). Berdasarkan hal-hal ini, secara sederhana dapat diketahui jika Ukraina menunjukkan sikap yang skeptis dan cenderung berusaha untuk melakukan delegitimasi terhadap UOC-MP, karena subordinasinya dengan Rusia yang

menunjukkan manifestasi ancaman terhadap keamanan nasional Ukraina secara konkret.

2.4. Aktivitas dan Pengaruh Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow di Ukraina

UOC-MP sebagai sebuah Gereja Ortodoks kurang lebih memiliki aktivitas yang hampir sama dengan kebanyakan Gereja Ortodoks lainnya. Setidaknya Ortodoksi meyakini bahwa bekerja adalah cara mempraktikkan iman yang meliputi berdoa, membaca kitab, dan ibadah. Hal lain yang juga dianggap penting adalah sumbangan bagi yang membutuhkan, kepatuhan terhadap perintah Allah, menggunakan talenta kita untuk melayani sesama, serta mengelola hidup kita secara keseluruhan (Akrotirianakis, 2023). Begitu juga dengan UOC-MP. Meski dalam keadaannya yang dilematis, mereka masih menjalankan ibadah dan doa yang dilaksanakan rutin seperti contoh baru-baru ini UOC-MP merayakan Liturgi Ilahi Hari Raya Efifani dan Malam Efifani di Kyiv-Pechersk Lavra, Liturgi Ilahi dalam rangka peringatan Santo Seraphim dari Sarov yang dipimpin oleh Yang Mulia Metropolitan Onufriy dari Kyiv dan Seluruh Ukraina, serta ibadah-ibadah dan Liturgi Ilahi lainnya (Ukraine Orthodox Church, 2025a, 2025b).



Gambar 2.2 Liturgi Ilahi UOC-MP dalam Perayaan Teofani

Sumber: Ukraine Orthodox Church, 2025a

Selain aktivitas peribadatan, UOC-MP juga melakukan beragam aktivitas yang sifatnya pelayanan. Pada tanggal 28 Januari 2025, lebih dari 200 keluarga migran paksa meminta bantuan kepada Departemen Sinode Urusan Sosial dan Kemanusiaan UOC. Banyak keluarga, anak-anak, penyandang disabilitas dan pengemis terlebih dari daerah Donetsk, Kharkiv, Sumy dan Kherson yang diminta mengisi kuesioner untuk nantinya didistribusikan. Di wilayah Rivne para imam dan umat mendonorkan darahnya untuk penderita kanker sementara di Kharkiv para pendeta dan mahasiswa Seminari Teologi Kharkiv mendonorkan darahnya untuk kebutuhan militer dan warga Kharkiv yang membutuhkan (Ukraine Orthodox Church, 2025c). Di wilayah Kyiv setiap hari Jumat, karyawan dan sukarelawan Departemen Sinode UOC untuk masalah sosial dan kemanusiaan memberi makan para tunawisma, pensiunan, dan orang yang membutuhkan di alun-alun seberang Gereja atas nama Martir Agung George di Stasiun Kereta Api Selatan Kyiv (Ukraine Orthodox Church, 2025d). Hal-hal ini merupakan beberapa contoh dari karya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh UOC.

Dari sisi pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Ukraina, UOC-MP dianggap punya pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Ukraina terutama dalam kapasitasnya sebagai salah satu Gereja Ortodoks awal-awal yang berdiri di Ukraina. UOC-MP acapkali dianggap sebagai perpanjangan tangan Rusia di Ukraina sehingga pengaruh UOC-MP tidak lepas dari hubungannya dengan Rusia. Dalam konteks hubungan Rusia dan Ukraina dalam periode pasca-Soviet, UOC-MP memainkan peranan penting dalam menyebarkan pengaruh dari kebijakan Moskow melalui *soft power*, dan sejauh ini dianggap menjadi alat yang paling efektif. Paling tidak upaya ROC dalam menanamkan teknologi politiknya di Ukraina dapat ditelisik dari pembentukannya sampai tahun 2014 yang dilakukan dengan secara reguler mengunjungi UOC-MP terus menerus, menghalangi upaya UOC untuk berdiri independen, mengandalkan klerikalisme agresif gerakan sosial yang terkait dengan Gereja, serta menginisiasi proyek dan langkah-langkah yang dirancang untuk menunjukkan keberadaan bersama seperti dalam urusan warisan, silsilah dan hal lainnya (Artymyshyn, 2022).

Menjelang dan sewaktu aneksasi Krimea, beberapa pendeta UOC-MP menarasikan dukungannya terhadap aktivitas pro-Rusia yang meningkatkan kehadiran “musuh potensial” yang berusaha memisahkan Ukraina dan Ortodoksi Timur. Di sisi lain, UOC-MP menjadi media Rusia dalam menyebarkan narasi Rusia di tengah panasnya militer. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Donbas yang alih-alih menyebut krisis Ukraina dengan terminologi lain yang seolah mendukung aksi tersebut seperti dengan istilah perang saudara, operasi hukuman, dan pembunuhan tanpa hukuman. Pernyataan tersebut kemudian diinterpretasikan lagi sebagai pembelaan Ortodoksi Kanonik dalam melawan Junta Nazi dan kegiatan-kegiatan destruktif terhadap Ortodoksi (Artymyshyn, 2022).

UOC-MP disinyalir masih menyebarkan propagandanya melalui salah satu situs keagamaan yakni di Kyiv-Pechersk Lavra. Investigasi terbaru dari SBU menyebutkan jika terdapat bukti-bukti yang dilakukan oleh terdakwa yang berkolaborasi dengan otoritas pendudukan, mempromosikan narasi pro-Rusia dan membenarkan agresi militer Rusia di Ukraina. Sebelumnya, Presiden Zelenskyy memberlakukan keputusan oleh *National Security and Defense Council* (NSDC) atau Dewan Keamanan, “untuk mencegah kegiatan di Ukraina organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan pusat -pusat pengaruh di Federasi Rusia sesuai dengan norma-norma hukum internasional di bidang kebebasan hati nurani dan komitmen Ukraina” (Synchak et al., 2023). Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional juga memutuskan adanya alasan hukum dan kepatuhan mengenai penggunaan properti organisasi keagamaan yang terletak di wilayah cagar budaya dan sejarah nasional Kyiv-Pechersk Lavra yang memungkinkan mereka melakukan inspeksi untuk membatasi pengaruh Rusia dan penggunaan properti keagamaan di kawasan Kyiv-Pechersk Lavra seperti yang dapat diperhatikan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Bukti Penyebaran Pengaruh UOC-MP



Sumber: Synchak et al., (2023)

Pada gambar nomor 1 merupakan *leaflet* yang ditemui oleh Dinas Keamanan Ukraina dan siap didistribusikan. Pada bagian atas berisikan “Berhenti menumpahkan darah! Untuk masa depan yang cerah bersama dengan Rusia. Damai - Damai (Damai untuk Dunia)! ” sementara bagian bawah berisi “Satu -satunya orang persaudaraan (jelas, kita berbicara tentang Rusia dan Ukraina).” Pada gambar

nomor 2 menunjukkan bahwa membacanya tidak bertentangan dengan aneksasi Rusia di Donbas. Majalahnya berjudul “Rumah Rusia” yang menjelaskan bahwa majalah itu bagi mereka yang mencintai Rusia. Gambar nomor 3, merupakan kartu pos dengan permohonan dari Patriark Kiril yang sejak awal memberkati perang dan melegitimasi tindakan Rusia tersebut dan pada kartu tersebut disarankan untuk mencetak hampir semua fragmen teks permohonan. Terakhir gambar nomor 4, merupakan sebuah koran berkala dengan judul “Utusan Rusia” yang berslogan “untuk iman, raja, dan tanah air” yang kemungkinan besar merupakan majalah pro-Rusia. Kesemua temuan ini siap didistribusikan dan mengisyratkan situs Pechersk Lavra sebagai pusat penyebaran narasi dan pengaruh Rusia, begitu juga dengan Lavra yang merupakan situs keagamaan yang dimiliki UOC-MP.

2.5. Kontroversi eksistensi Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow di Ukraina

2.5.1 Subordinasi dengan Patriarkat Moskow

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, UOC-MP diketahui masih menjaga subordinasinya dengan Patriarkat Moskow atau dengan ROC. Subordinasi yang terjaga ini memunculkan anggapan jika UOC-MP merupakan bagian dari proksi Rusia atau pun ROC untuk mempertahankan eksistensinya di Ukraina, terlebih dengan membuat UOC-MP sebagai penyalur kebijakan Moskow dan sebagai alat penyebaran budaya Rusia di Ukraina. UOC-MP telah diatur sedemikian rupa untuk melakukan indoktrinasi Dunia Rusia di Ukraina. Akan tetapi dari sudut pandang Ukraina, subordinasi ini merupakan sebuah hal yang menjadi masalah terutama pasca kemerdekaan mengingat jika pada periode tersebut, upaya untuk mewujudkan kemerdekaan secara konkret dan holistik sangat diperjuangkan termasuk dalam konteks spiritual. Momentum kemerdekaan menjadi katalis dari transformasi ruang spiritual masyarakat Ukraina yang saat itu disebut sebagai *religious explosion*, namun konfrontasi ideologis dengan Rusia masih tetap terjadi terutama melalui gagasan *Third Rome* dan juga *Russian World* yang menjadi hambatan bagi Ukraina untuk memulihkan paradigma budaya dan peradabannya terlebih mengenai otonomi (Ishchuk & Sagan, 2020). Hal ini yang kemudian

membuat masyarakat Ukraina lebih cenderung untuk mendukung gagasan otokefali alih-alih menjadikan UOC-MP sebagai Gereja Ortodoks satu-satunya.

Dependensi dengan Patriarkat Moskow ini dianggap sebagai ancaman kritis sepanjang agresi Rusia ke Ukraina. Keterhubungan dan ketergantungan dengan Patriarkat Moskow akhirnya mengarahkan UOC-MP pada posisi yang lebih cenderung mendukung Rusia alih-alih mendukung Ukraina. Sebagaimana agresi Rusia yang dimulai sejak aneksasi Krimea hingga saat ini memposisikan UOC-MP dalam anggapan jika mereka tidak lain merupakan pendukung Rusia, terutama ketika segelintir pendeta-pendeta UOC-MP menarasikan dukungannya terhadap aktivitas pro-Rusia, menyebarkan narasi Rusia dalam krisis di Ukraina, dan sikap yang menyebutkan jika krisis di Ukraina merupakan perang saudara, operasi hukuman, dan terminologi lainnya yang seolah ingin menghindari penyebutan Rusia sebagai sumber dari krisis yang terjadi (Artymyshyn, 2022). Penggambaran akan ancaman kritis ini semakin menguat ketika amandemen statuta Patriarkat Moskow pada 2017 yang mewajibkan bagi seluruh pendeta UOC-MP untuk mengimplementasikan doktrin Dunia Rusia yang juga diterapkan oleh otoritas pemerintah Rusia bersama dengan Gereja Ortodoks. Dengan demikian, pendeta UOC-MP, secara hierarkis bersubordinasi kepada Patriark menyatakan gagasan nasionalisme, patriotisme Rusia, dan doktrin Dunia Rusia itu sendiri dalam khutbah dan kegiatannya, sehingga secara objektif mengimplementasikan gagasan tersebut (Ishchuk & Sagan, 2020). Secara sederhana, subordinasi dengan ROC menjadi kontroversial lantaran ancaman kritis yang ditunjukkannya terhadap masyarakat Ukraina, terlebih dalam hal diseminasi gagasan pro-Rusia di Ukraina.

Upaya untuk memutuskan hubungan antara Rusia dan UOC-MP telah dilakukan sejak kemerdekaan Ukraina. UOC-MP secara terus menerus mendapat tekanan untuk segera memutuskan hubungannya dengan Rusia. Beberapa peristiwa yang kemudian menunjukkan upaya untuk memutuskan hubungan tersebut adalah saat pembentukan UOC-KP yang dilatarbelakangi atas upaya otokefali yang diusung oleh Metropolitan Filaret yang dianggap skismatis oleh ROC, sehingga kemudian Metropolitan Filaret bersama dengan pendeta-pendeta dari UOC-MP sebelumnya mendirikan UOC-KP (Fert, 2020). Pada era presiden Yuschenko juga

muncul gagasan untuk menyatukan Gereja Ortodoks utama menjadi Gereja nasional, namun inisiatif ini baru berhasil saat Presiden Poroshenko berhasil mendapatkan otonomi terhadap OCU pada tahun 2019. OCU mendapat dukungan dari pemerintah dan publik Ukraina mengingat pasca agresi besar-besaran terlebih pada tahun 2014, UOC-MP tidak diterima lagi secara politik dan budaya, sehingga pembentukan Gereja Ortodoks yang independen dari Patriarkat Moskwa lebih dikehendaki. Proses otonomi ini berjalan beriringan dengan konsolidasi dan pelebagaan masyarakat sipil di Ukraina dengan menekankan proses yang lebih damai dan sukarela, sehingga aliansi yang dibangun bersama ini menjadi pondasi masyarakat Ukraina yang ideal dan dasar dari pembangunan pemerintahan yang baik (Clark & Vovk, 2020).

Terakhir, pasca invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 UOC-MP melalui Sidang pada 27 Mei 2022 melakukan amandemen terhadap statutenya sendiri. Salah satu poin yang cukup menarik adalah statuta ini menyatakan jika UOC-MP merdeka dari ROC (Ukraine Orthodox Church, 2022b). Meski demikian, cukup banyak yang menganggap jika hal ini tidak benar-benar memutus hubungan mereka dengan ROC. Pasalnya, melalui hasil investigasi dari kelompok tim ahli bersama dengan SEFC menyebutkan jika UOC-MP tetap menjaga subordinasinya dengan ROC (State Service for Ethnopolitics and Freedom of Conscience, 2023). Berdasarkan hasil ini, secara teknis dapat dinyatakan jika UOC-MP masih tetap menjaga subordinasinya dengan ROC, sehingga klaim jika mereka benar-benar merdeka tidak dapat diterima terlebih karena tidak adanya bukti yang benar-benar konkret.

2.5.2 Perpecahan dengan Orthodox Church of Ukraine (OCU)

Di sisi lain, kontroversi eksistensi UOC-MP juga tidak lepas dari terbentuknya gereja *Orthodox Church of Ukraine* (OCU) pasalnya pembentukan OCU juga tidak jauh dari kritik Patriarkat Moskwa dan UOC-MP mengenai pembentukannya. Gereja OCU merupakan Gereja yang diakui secara independen dan setara dengan Gereja lainnya. Gereja ini muncul pada 15 Desember 2018 pasca pemberian *tomos* oleh Patriark Ekumenis Bartholomew melalui keputusan Sidang

Sinode Patriarkat Konstantinopel. Gereja ini dipimpin oleh Metropolitan Epifanii sebagai Primat Gereja. OCU berdiri sebagai bagian dari Gereja Konstantinopel sebagai “Ibu” Gerejanya (Figurnyi et al., 2022).

Seperti yang sudah disebutkan, proses pendirian Gereja ini juga tidak lepas dari konfrontasi yang melibatkan UOC-MP karena dari awal pembentukannya saja terlihat upaya permohonan otokefali dan pemberian *tomos* terhadap OCU sarat dianggap sebagai gerakan skismatik terhadap Ortodoksi. Sedari awal UOC-MP memberikan tanggapan yang tidak mendukung inisiatif tersebut dengan menyebut upaya otokefali ini sebagai penyalahgunaan wewenang dan campur tangan dalam urusan Gereja. Hal ini kemudian menghambat pembentukan OCU karena dukungan yang kurang, terlebih UOC-MP memegang jumlah umat ortodoks terbanyak di Ukraina. Inisiasi otokefali kemudian disambut terbuka oleh Patriarkat Ekumenis yang akan mempertimbangkan pemberian otokefali. Pendekatan Patriarkat Moskow melalui kunjungan Kiril atas dorongan dan protes UOC terhadap Moskow ke Istanbul juga tidak merubah ketentuan Patriark Ekumenis, dan akhirnya Patriark Ekumenis melanjutkan inisiatif otokefali yang digagas oleh UOC-KP dan UAOC (Mudrov, 2019).

Tensi antar kedua gereja ini juga dapat disaksikan terlebih pasca invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Kejadian ini, membuat polarisasi yang signifikan dalam Ortodoksi di Ukraina karena banyak masyarakat yang lebih berpihak kepada OCU alih-alih berpihak kepada UOC-MP. Hal tersebut disebabkan lantaran label UOC-MP sebagai perpanjangan tangan Rusia dan sikapnya yang tidak jelas apakah mendukung Rusia atau Ukraina. Label tersebut menjadi landasan banyaknya umat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari OCU begitu juga banyaknya pendeta atau pihak-pihak UOC-MP yang kemudian berpindah ke OCU dengan jumlah sekitar 400 pendeta UOC-MP berpindah subordinasi kepada OCU (Kuryliak & Synchak, 2022). Di samping itu, OCU sebagai unifikasi dari Gereja-Gereja Ortodoks pro-Ukraina, mendukung aspirasi Ortodoks-Ukrainofilia dan integrasi Eropa yang digaungkan mayoritas masyarakat Ukraina sendiri (Ishchuk & Sagan, 2020). Kesesuaian visi dengan masyarakat Ukraina secara mayoritas ini akhirnya juga mendorong perubahan jumlah umat yang terafiliasi dengan UOC-MP,

sehingga eksistensi OCU secara signifikan mengurangi pengaruh UOC-MP dalam struktur sosial Ukraina.

Lebih lanjut, lewat Resolusi Dewan Gereja Ortodoks Ukraina pada 27 Mei 2024 memuat poin-poin mengenai sikap UOC-MP termasuk ungkapan penyesalan mengenai berpisahnya UOC-MP dan OCU yang mendorong agar dibukanya dialog bersama OCU dengan beberapa ketentuan yakni meminta penghentian penyitaan Gereja dan pemindahan paksa paroki-paroki UOC, meminta mereka menyadari status kanonik mereka yang tidak lebih dari kebebasan dan kesempatan dalam pelaksanaan Gereja, dan menyelesaikan masalah kanonikalitas hierarki OCU (Ukraine Orthodox Church, 2022b). Hal ini dianggap keliru karena, menurut penuturan E. Zarya, seorang Uskup Agung Chernigov dan Nizhyn sebanyak 400 pendeta telah meninggalkan UOC-MP sejak Rusia mulai melakukan invasi sehingga hal ini merupakan pengulangan narasi Kremlin yang tidak mengakui identitas persuasi agama Ukraina (Kuryliak & Synchak, 2022). Terlepas dari argumen pemindahan paksa, tetap saja terdapat argumen yang secara objektif dapat membantah pendapat tersebut, terutama tindakan kejahatan yang telah dilakukan Rusia yang memengaruhi motivasi untuk bergabung dengan UOC-MP

2.5.3. Persepsi Publik Ukraina terhadap UOC-MP

Perkembangan Ortodoksi di Ukraina berikut dengan banyaknya hal-hal lain terutama keinginan untuk lepas dari pengaruh Rusia menjadi beberapa faktor determinan yang akhirnya mengubah persepsi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UOC-MP. Terutama mulai dari tahun 2014 yang menjadi salah satu momen yang membawa Ukraina untuk melawan pengaruh Rusia. Pernyataan ini dapat dibuktikan lewat serangkaian survei yang dilakukan beberapa lembaga termasuk mengenai eksistensi UOC-MP di Ukraina. Menurut survei yang dilakukan oleh Razumkov Centre, dalam periode tahun 2010-2018 jumlah umat beriman UOC-MP mengalami penurunan terus-menerus dari 24% di tahun 2010 menjadi 12% di tahun 2018. Penurunan ini juga terus bertambah semenjak Rusia mengawali invasi skala penuh, dengan hanya 5,5% orang yang menyebut kesetiaan dengan dengan UOC-MP dari 13% di tahun 2021. Pada tahun 2024, hanya 3%

responden yang menyebut diri mereka sebagai anggota komunitas UOC-MP dari jumlah 4% pada tahun 2021. Terdapat juga perbedaan yang cukup signifikan ketika lembaga survei menanyakan perihal afiliasi Gereja, pasalnya secara rata-rata hanya 5,5 % responden yang menyebut mereka tergabung dalam UOC-MP, sementara 35,2 % nya menyebut afiliasi mereka kepada OCU seperti yang dapat diperhatikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Survei Asosiasi Gereja Ortodoks di Ukraina

Which Orthodox Church do you associate yourself with?

	Ukraine	Regions:			
		West	Centre	South	East
Orthodox Church of Ukraine (Metropolitan Epiphanius)	35.2	28.0	44.9	27.6	29.5
Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (Metropolitan Onuphrius)	5.5	5.1	4.7	9.6	5.2
Another Orthodox Church	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
Just Orthodox	13.7	4.4	16.6	18.4	17.0
I don't know	0.9	0.6	1.0	0.4	1.4
I am not Orthodox	44.6	61.9	32.8	43.9	46.9

Sumber: (Yakymenko et al., 2024)

Di sisi lain, ketika menilai sikap mereka sendiri terhadap agama dan gerakan keagamaan yang paling tersebar luas di negara ini, 75% masyarakat Ukraina bersikap positif terhadap Ortodoksi, 18% acuh tak acuh, dan 1 % memiliki sikap negatif terhadapnya. Akan tetapi, ketika ditanyakan mengenai sikap mereka terhadap Gereja Ortodoks tertentu, maka penilaiannya menjadi lebih rumit. OCU mendapatkan respon yang mayoritas positif dengan 64% responden melihatnya secara positif, 23,5% acuh tak acuh, dan 3% sikap negatif dari yang sebelumnya sebanyak 55%, 22%, dan 4% secara berurut di tahun 2021. Di sisi lain, UOC-MP secara keseluruhan mendapatkan respon negatif dengan 13% respon positif, 22% acuh tak acuh, dan 54% respon negatif dari yang sebelumnya sebesar 34%, 24%, dan 20% secara berurutan di tahun 2021. Sikap positif dari OCU diekspresikan oleh sebagian besar penduduk di semua wilayah. 53% di Timur hingga 75% di Barat sementara sikap negatif terhadap UOC-MP diekspresikan di Barat sebesar 77%, di

tengah sebesar 55% dan di Timur sebesar 38%. Data ini ditunjukkan pada gambar 2.4.

Gambar 2.4 Perasaan Responden mengenai Agama, Gerakan Agama, dan Gereja

HOW DO YOU FEEL ABOUT THE FOLLOWING RELIGIONS, RELIGIOUS MOVEMENTS AND CHURCHES? % of respondents							
	UKRAINE			REGIONS (October 2024)			
	2021	2023	2024	West	Centre	South	East
Orthodoxy							
Positive	73.6	75.8	75.3	78.9	77.7	72.8	67.8
Indifferent	12.2	16.9	17.7	13.1	17.3	20.9	22.4
Negative	1.4	1.6	1.0	0.2	0.6	0.4	3.3
Never thought about it	10.9	5.6	5.7	7.8	4.1	5.9	6.1
Never heard about such religion/movement	1.6	0.1	0.3	0.0	0.4	0.0	0.5
Orthodox Church of Ukraine (Metropolitan Epiphanius)							
Positive	55.4	66.6	64.3	75.0	64.9	57.7	53.4
Indifferent	21.8	21.6	23.5	15.0	24.7	27.2	29.6
Negative	4.0	3.6	2.9	1.1	2.5	1.7	6.4
Never thought about it	15.5	7.7	8.8	8.8	7.0	13.0	10.1
Never heard about such religion/movement	2.7	0.4	0.5	0.0	1.0	0.4	0.5
Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate (Metropolitan Onufriy)							
Positive	33.8	12.2	13.3	7.4	12.5	26.4	15.1
Indifferent	24.3	19.2	21.6	9.0	22.0	27.6	33.0
Negative	20.4	58.5	54.1	77.3	54.9	28.0	38.2
Never thought about it	18.0	10	10.3	6.3	9.3	17.6	13.2
Never heard about such religion/movement	3.1	0.1	0.7	0.0	1.3	0.4	0.5

Sumber: (Yakymenko et al., 2024)

Survei serupa juga dilakukan oleh Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) dari tanggal 20 September hingga 3 Oktober 2024. Dari survei yang dilakukan oleh KIIS, diperoleh beberapa hasil yang menyangkut keberadaan UOC-MP. Pertama dari 70% responden yang mengaku menganut Ortodoksi, sebanyak 56% responden mendaftarkan diri mereka di OCU sementara hanya 6% yang mendaftar di UOC-MP (Kyiv International Institute of Sociology, 2024a). OCU hampir mendominasi di semua bagian wilayah Ukraina dengan 50% di Barat, 63% di tengah, 55% di selatan, dan 50% di timur. Dalam hal dukungan terhadap pembentukan Gereja Ortodoks yang tunggal, 61% masyarakat Ukraina mendukung

gagasan bahwa hanya ada satu Gereja Ortodoks di Ukraina, 16% tidak mendukung, dan 20% lainnya menganggap tidak penting. Mayoritas responden juga menyebutkan jika proses penyatuan yang didukung adalah opsi ketika hierarki dan pendeta UOC-MP yang tidak terpengaruh oleh hubungan dengan Rusia bergabung dengan OCU dengan jumlah 47% responden memberi dukungan dan 66% yang telah memutuskan masalah ini. Berikut juga mereka menyebutkan jika Metropolitan Epifanii lebih dikehendaki jika nantinya Gereja Ortodoks yang tunggal berdiri dengan jumlah 50% responden mendukung dan 76% yang telah menentukan pendapat mereka (Kyiv International Institute of Sociology, 2024a).

2.5.4. Potensi Dilarangnya Aktivitas UOC-MP

Dengan segala kontroversinya di Ukraina, UOC-MP kemudian dihadapkan akan kemungkinan dilarangnya Gereja ini untuk beraktivitas. Meskipun upaya untuk melimitasi pengaruh dari Rusia di Ukraina sudah dilakukan sejak beberapa tahun bahkan puluhan tahun yang lalu, tetapi sejauh ini UOC-MP masih dapat beraktivitas seperti halnya Gereja pada umumnya. Sejak tahun 2016, Verkhovna Rada sebagai institusi yang mengurus peraturan dan legislasi beberapa kali mengeluarkan peraturan yang salah satunya ditujukan untuk menangkal pengaruh UOC-MP di Ukraina seperti misalkan lewat RUU 4128 'tentang kebebasan hati nurani dan organisasi keagamaan', RUU 4511 yang dimasukkan dalam agenda yang berjudul “Tentang Status Khusus Organisasi Keagamaan yang Pusat Pemerintahannya Berlokasi di Negara yang Diakui oleh Parlemen Ukraina sebagai sebuah Negara Agresor”, dan RUU No. 5309 yang disahkan sebagai Addendum No. 2662-VIII pada hukum Ukraina “Tentang Kebebasan Hati Nurani dan Organisasi Keagamaan” pada tahun 2018 (Hudson, 2018; Shestopalets, 2020a). Beberapa waktu terakhir, Verkhovna Rada mengeluarkan RUU Tentang Amandemen Undang-Undang Tertentu Ukraina Mengenai Kegiatan Organisasi Keagamaan di Ukraina” No. 8371 tanggal 19 Januari 2023 yang membahas mengenai “Tentang ketidakmungkinan kegiatan organisasi keagamaan di Ukraina, konsep manajemen yang terletak di negara bagian yang melakukan agresi bersenjata melawan Ukraina” (Taras Shevchenko National University of Kyiv,

Kyiv, Ukraine & Stetsiak, 2023). Terakhir, pada tanggal 20 Agustus 2024, Verkhovna Rada mengesahkan Undang-Undang Nomor 3894-IX “Tentang Perlindungan Tatanan Konstitusional di Bidang Kegiatan Organisasi Keagamaan,” yang melarang kegiatan Gereja Ortodoks Rusia di Ukraina dan propaganda “Dunia Rusia” dan bagi struktur organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan negara agresor (Embassy of Ukraine in Indonesia, 2025). Undang-Undang ini mensyaratkan bagi organisasi keagamaan yang berpusat di negara agresor untuk memutuskan hubungannya dengan negara agresor dalam waktu 9 bulan yang jika tidak dipatuhi, maka State Service of Ukraine for Ethnic Policy and Freedom of Conscience (SEFC) berhak untuk menggugat dan mengakhiri pendaftaran negara atas organisasi tersebut. Sebanyak 265 anggota parlemen mendukung keputusan ini dan undang-undang ini mulai berlaku sejak 23 September (Ukrainian Catholic University, 2024).

Perumusan UU ini kemudian menuai cukup banyak dukungan dari masyarakat Ukraina. Lewat survei yang dilakukan oleh KIIS, 83% masyarakat Ukraina memercayai bahwa negara perlu mengintervensi aktivitas UOC-MP dengan 63% menyatakan persetujuannya untuk melarang secara penuh Gereja ini (Kyiv International Institute of Sociology, 2024b). Begitu juga dengan survei yang dilakukan Razumkov Centre pada tahun 2024, yang menyebutkan jika 74% responden mendukung terwujudnya undang-undang tersebut. Di sisi lain, 79% mendukung ketentuan jika organisasi keagamaan yang beroperasi di Ukraina tidak dapat memiliki pusat di negara agresor, 75% mendukung ketentuan jika organisasi keagamaan yang beroperasi di Ukraina tidak dapat menjadi bagian dari organisasi keagamaan asing yang kegiatannya dilarang di Ukraina, dan 80% mendukung ketentuan jika ideologi “Dunia Rusia” baik secara langsung dan lewat organisasi keagamaan dan badan-badan pemerintahannya adalah alasan untuk melarang organisasi keagamaan semacam itu (Yakymenko et al., 2024). Meski demikian, dari 74% yang mendukung, hanya 50% yang menyebutkan jika otoritas negara seperti pengadilan berhak untuk melarang kegiatan Gereja atau asosiasi keagamaan tertentu, sementara sebesar 58% dari mereka yang mendukung larangan Gereja Ortodoks Rusia menyatakan jika larangan dapat diterima dalam beberapa kasus

untuk melarang kegiatan masing-masing Gereja atau asosiasi agama. Jawaban ini kemudian timbul karena mereka yang mendukung larangan terhadap ROC menganggapnya sebagai struktur propaganda alih-alih sebagai organisasi keagamaan (Yakymenko et al., 2024). Secara singkat, dalam kedua survei yang dilakukan, tingkat persepsi publik mengenai potensi larangan terhadap UOC-MP mendapat simpati yang besar, sehingga dari sini dapat disimpulkan jika UOC-MP mulai mengalami keterbatasan dalam ruang geraknya sebagai Gereja dan sebagai alat propaganda Rusia.